



Kementerian PPN/  
Bappenas



LAPORAN  
TRIWULAN

2

2023

# LAPORAN 2 TRIWULAN 2023



# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	4
<b>I. Rencana Kerja ICCTF Tahun 2022</b>	6
<b>II. Progres dan Capaian</b>	11
<b>A. Progres Proyek</b>	12
1. COREMAP–CTI Asian Development Bank	12
2. Blue Carbon	20
3. Blue Finance	24
<b>B. Program Strategis, Potensi Kerja Sama, dan Penggalangan Dana</b>	33
<b>C. Komunikasi, Outreach dan Kemitraan</b>	46
<b>III. Audit, Keuangan dan Operasional</b>	51
<b>A. Audit BPK Tahun 2023</b>	52
<b>B. Informasi Keuangan Periode Januari - Maret 2023</b>	52
<b>C. Operasional / Kesekretariatan</b>	53



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*) dalam bidang penanganan perubahan iklim. Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ICCTF mengelola dana APBN dan dana hibah dari mitra pembangunan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca serta implementasi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan yang dilaksanakan ICCTF meliputi pengelolaan proyek, penggalangan dana, komunikasi dan *outreach* serta operasional Satker. Dalam hal pengelolaan proyek, ICCTF membagi proyek-proyek yang dikelola berdasarkan *thematic windows* ke dalam empat fokus area, yaitu i) *Land-based Mitigation*; ii) *Adaptation and Resilience*; iii) *Energy*, dan; iv) *Marine-based*. Sejalan dengan peningkatan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan laut dan sumber dayanya, saat ini ICCTF menitikberatkan fokus pada tema program berbasis kelautan (*Marine-based*) sejak tahun 2020.

Pada periode triwulan kedua tahun 2023 ini, salah satu fokus utama ICCTF adalah penyelesaian proyek COREMAP – CTI Asian Development Bank (ADB) yang akan resmi berakhir pada bulan Agustus mendatang. Kegiatan implementasi sudah selesai dilaksanakan di 3 kawasan, yaitu: TPK Gili Balu dan TWP Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan KKPD Nusa Penida, Provinsi Bali. Kegiatan pemeriksaan aset oleh BPK juga telah selesai dilaksanakan pada akhir triwulan pertama 2023. Kegiatan yang baru saja selesai dilaksanakan pada akhir triwulan kedua ini adalah Training MSC, Exit Strategy dan Media Visit.

Project selanjutnya yang menjadi fokus utama ICCTF adalah Blue Carbon dengan AFD. Pada bulan Mei, Bappenas-ICCTF bekerja sama dengan AFD telah sukses menyelenggarakan Kick-Off Meeting dengan tema “Integrasi Karbon Biru dalam Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia” di Hotel Pullman, Jakarta. Tahap selanjutnya, ICCTF akan bersiap untuk proses persiapan implementasi proyek.

Kemudian untuk *Blue Finance* dan *Aquaculture*, ICCTF masih melanjutkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* terkait. Untuk *Blue Finance*, sebelumnya dua dokumen telah selesai disusun yaitu *Blue Finance Policy Note* dan *Blue Finance Instruments Development Guideline*. Progress pada akhir triwulan kedua ini adalah telah disubmitnya TOR pengadaan tenaga ahli dan konsultan untuk project LAUTRA. Sedangkan untuk *Aquaculture* saat ini masih dalam tahap negosiasi *agreement*.

Untuk penjangkauan informasi, hasil kegiatan-kegiatan ICCTF diwartakan melalui website dan media sosial ICCTF. Ada pun untuk semakin meningkatkan kualitas produk komunikasi yang dihasilkan, saat ini ICCTF masih dalam proses pengadaan konsultan untuk tim komunikasi dan IT.



1

# RENCANA KERJA ICCTF TAHUN 2023

# Q1

JAN – MAR

## **Pengelolaan Proyek**

### **Kegiatan Pendukung Hibah Existing**

- Pendampingan Hibah COREMAP-CTI ADB
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project

### **Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline**

- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture

### **Kegiatan Audit**

- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI Asian Development Bank
- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI World Bank

## **Dukungan Operasional**

### **Pelaksanaan Rapat Koordinasi**

- Rapat Koordinasi Operasional Satker ICCTF
- Rapat Penyusunan Laporan

### **Dukungan Personil ICCTF**

- Konsultan & Jasa Lainnya

**Q2**  
APR – JUN

### **Pengelolaan Proyek**

#### **Kegiatan Pendukung Hibah Existing**

- Pendampingan Hibah COREMAP-CTI ADB
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project

#### **Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline**

- Koordinasi Dana Pendukung Hibah AFD Ocean Energy Study: EBT dari Laut
- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture

#### **Kegiatan Audit**

- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI Asian Development Bank
- Pendampingan Audit Proyek COREMAP-CTI World Bank

#### **Perencanaan Dampak Climate Change sebagai Input untuk RPJMN 2025 - 2029**

- Kegiatan Perencanaan Neraca Sumber Daya

#### **Kegiatan Komunikasi dan Penggalangan Dana**

- Kegiatan Komunikasi Outreach
- Partisipasi dalam Event Perubahan Iklim

#### **Dukungan Operasional**

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi
- Rapat Koordinasi Operasional Satker ICCTF
- Rapat Penyusunan Laporan
- Dukungan Personil ICCTF
- Konsultan & Jasa Lainnya

**Q3**  
JUL - SEP

### **Pengelolaan Proyek**

- **Kegiatan Pendukung Hibah Existing**
- Pendampingan Hibah COREMAP-CTI ADB
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project
- **Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline**
- Koordinasi Dana Pendukung Hibah AFD Ocean Energy Study: EBT dari Laut
- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture
- **Perencanaan Dampak Climate Change sebagai input untuk RPJMN 2025 - 2029**
- Kegiatan Perencanaan Neraca Sumber Daya

### **Kegiatan Komunikasi dan Penggalangan Dana**

- **Kegiatan Komunikasi Outreach**
- Partisipasi dalam Event Perubahan Iklim
- Produksi Publikasi Komunikasi
- **Penggalangan Dana Internasional**
- UN 2023 Water Conference – New York

### **Dukungan Operasional**

- **Pelaksanaan Rapat Koordinasi**
- Rapat Koordinasi Operasional Satker ICCTF
- Rapat MWA
- Rapat Penyusunan Laporan
- **Dukungan Personil ICCTF**
- Konsultan & Jasa Lainnya

**Q4**  
OCT - DEC

### **Pengelolaan Proyek**

- **Kegiatan Pendukung Hibah Existing**
- Kegiatan Pendukung Hibah AFD Blue Carbon Project
- **Kegiatan Pendukung Hibah Pipeline**
- Koordinasi Dana Pendukung Hibah AFD Ocean Energy Study: EBT dari Laut
- Kegiatan Dukungan Hibah Blue Finance
- Kegiatan Pendukung Hibah ADB: Aquaculture
- **Perencanaan Dampak Climate Change sebagai input untuk RPJMN 2025 - 2029**
- Kegiatan Perencanaan Neraca Sumber Daya

### **Kegiatan Komunikasi dan Penggalangan Dana**

- **Kegiatan Komunikasi Outreach**
- Produksi Publikasi Komunikasi
- **Penggalangan Dana Internasional**
- 2023 UN Climate Change Conference (UNFCCC COP 28)

### **Dukungan Operasional**

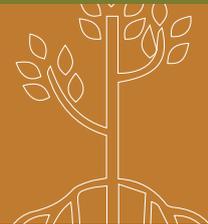
- **Pelaksanaan Rapat Koordinasi**
- Rapat Koordinasi Operasional Satker ICCTF
- Rapat Penyusunan Laporan
- **Dukungan Personil ICCTF**
- Konsultan & Jasa Lainnya



**2**

PROGRES dan  
**CAPAIAN**

## 1. COREMAP-CTI ASIAN DEVELOPMENT BANK



### a. Pelatihan Pendanaan Berkelanjutan untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan melalui Pengembangan Payment of Ecosystem Services (PES)

Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 4-5 April 2023, bertempat di Hotel Westin Jakarta. Agenda kegiatan ini adalah pelatihan pengelolaan kawasan konservasi perairan melalui pengembangan ide-ide pendanaan berkelanjutan. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pelatihan ini, antara lain sebagai berikut:

- Pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pengelola kawasan konservasi tentang konsep pendanaan berkelanjutan
- Pendanaan berkelanjutan diperlukan untuk dapat melaksanakan program pengelolaan kawasan konservasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan
- Beberapa upaya yang dilakukan untuk menjawab tantangan pendanaan, salah satunya melalui skema pengembangan pembayaran jasa ekosistem
- PES adalah suatu transaksi sukarela yang menggunakan suatu jasa ekosistem yang perlu dilestarikan dengan cara memberi nilai oleh penerima manfaat kepada penyedia



Gambar 1. Pemaparan Narasumber mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan

manfaat jasa ekosistem (Wunder, 2005). Dalam undang-undang, PES dijelaskan melalui UU No. 32 Tahun 2009

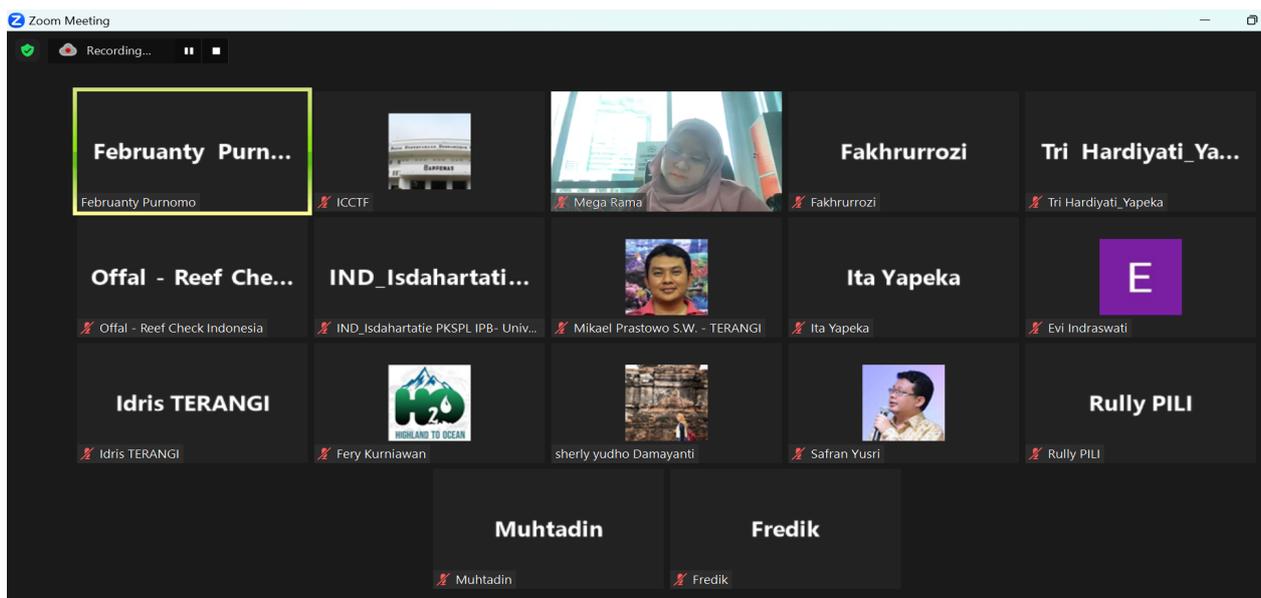
- Pola kelembagaan dalam pengelolaan PES, antara lain: Pengelolaan oleh pemerintah melalui PNBP, pengelolaan oleh Pemerintah melalui BLU/BLUD, dan pengelolaan bersama dengan mekanisme IMP
- BLU/BLUD merupakan solusi untuk meningkatkan sektor pelayanan publik dengan kelebihan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan mandiri.
- Penilaian atau valuasi SDA adalah memberikan perkiraan nilai wajar atau nilai ekonomi dari asset SDA maupun jasa ekosistem yang dihasilkan dari adanya SDA/ekosistem

- Cakupan pengukuran Nilai Ekonomi Lingkungan (NEL), meliputi: Neraca Aset, Neraca Arus, Neraca Aktivitas Lingkungan dan Neraca Ekosistem. Pengukuran SDA lebih banyak bertumpu pada Neraca Aset dan Neraca Ekosistem
- Nilai selanjutnya dilaporkan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan oleh pengelola kawasan
- Pada akhir pelatihan, untuk mempelajari contoh implementasi, peserta telah melakukan exercise dengan menggunakan teknik Net Present Value
- Peserta juga telah melakukan exercise bagaimana untuk mengambil keputusan secara spasial di kawasan konservasi

#### b. Rapat dengan Mitra Paket 1-6 untuk Persiapan Audit BPK COREMAP-CTI WB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2023 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda pertemuan ini adalah diskusi persiapan Audit BPK untuk COREMAP-CTI WB di NTT dan Raja Ampat . Kesimpulan dan tindak lanjut dari pelatihan ini, antara lain sebagai berikut:

- Audit BPK di Raja Ampat dan NTT akan dilakukan secara paralel pada tanggal 2-7 Mei
- ICCTF akan mendanai 2 orang dari masing-masing perwakilan Mitra
- Mitra diharapkan dapat tiba di lokasi lebih awal H-1
- Rundown kegiatan agar dibuat secara detail beserta daftar kebutuhan logistik
- Mitra harap mempelajari kembali completion engineering report
- Mitra yang akan mendampingi harus bisa menjawab pertanyaan dari BPK, serta mengetahui program yang dilaksanakan

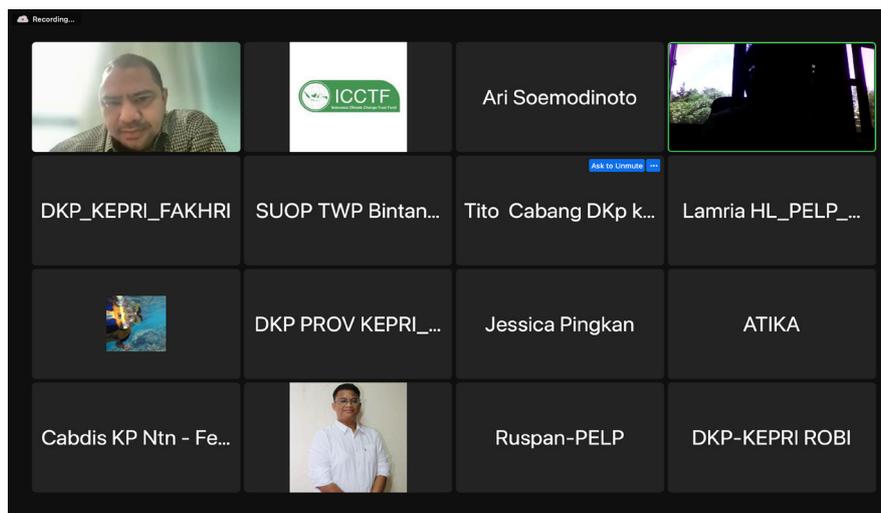


Gambar 2. Koordinasi ICCTF dan para Mitra untuk persiapan audit

**c. Pembahasan Persiapan Workshop Pengumpulan Data & Informasi untuk Status Dokumen Penetapan 3 MPA Prioritas Kepulauan Riau COREMAP-CTI ADB**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023. Agenda kegiatan ini adalah Pembahasan persiapan Workshop Pengumpulan Data dan Informasi untuk Status Dokumen Penetapan 3 MPA Prioritas Kepulauan Riau. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pelatihan ini, antara lain sebagai berikut:

- Kelanjutan daripada program COREMAP Phase 2 antara lain dari 4 kabupaten ada 5 hamparan sudah ditetapkan sebagai pencadangan kawasan konservasi: (i) Bintang 1 sudah ditetapkan oleh keputusan menteri kelautan; (ii) Bintang 2 di Tambelan belum ditetapkan; (iii) Batam; (iv) Lingga; dan (v) Natuna
- Tim DKP Kepri mendapat dukungan dari KKP untuk penetapan kawasan konservasi Natuna, tetapi tahun lalu ada pemotongan anggaran lagi sehingga prosesnya tertunda kembali. Tapi sudah dilakukan koordinasi teknis dan sudah ada tenaga ahli dan tim konsultan. Maka dari itu, COREMAP Phase 3 ini dapat membantu untuk melanjutkan penetapan kawasan yang tertunda ini
- Tim sudah melakukan kajian lebih awal terkait penetapan 3 kawasan MPA ini, sesuai dengan peraturan dengan Permen KP yang baru. Tiga kawasan ini termasuk dalam 5 kawasan sudah dicadangkan secara resmi oleh gubernur. Dalam konteks tersebut, tim akan memfasilitasi untuk menyusun rencana zonasi bagi ketiga MPA tersebut
- Terkait data dari Natuna, Batam, Lingga, sudah 99% tersedia. Untuk penyusunan RZWP3K data-data dan instrumennya sudah tersedia dan siap diintegrasikan. Di dalam RZWP3K, kawasan semula pada COREMAP lama sudah diangkat sebagai pencadangan
- Terkait peta batam lingga natuna harus dicek kembali karena zona inti tidak menutup akses ke satu pulau sehingga berpotensi menimbulkan konflik dengan nelayan, pada zona inti masih mengacu kepada permen KP 2010, perlu dikroscek apakah terdapat ekosistem target konservasi

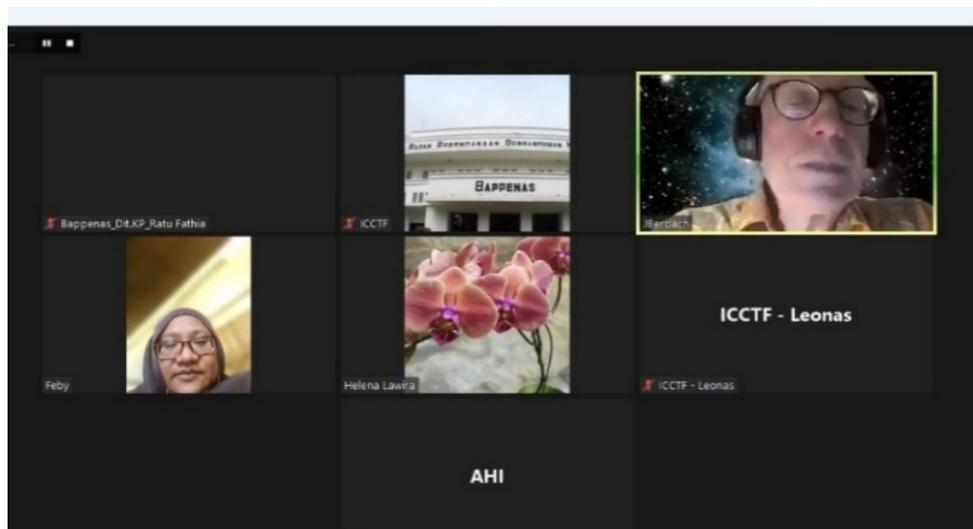


Gambar 3. Diskusi persiapan workshop 3 MPA prioritas Kepulauan Riau

#### d. Rapat Koordinasi dengan James Bardach (Konsultan PCR)

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2023 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda kegiatan ini adalah koordinasi rencana kerja penyusunan dokumen PCR dan kunjungan lapangan dengan international consultant PCR (Pak James Bardach). Kesimpulan dan tindak lanjut dari pelatihan ini, antara lain sebagai berikut:

- Saat ini ICCTF dalam proses pengadaan spesialis analisis ekonomi untuk mendukung dokumen PCR dan 1 orang di tingkat nasional untuk mendukung interpretasi dokumen PCR
- Konsultan nasional akan bekerja hingga Agustus. Kegiatan akan berakhir 2 minggu sebelum 31 Agustus untuk fokus pada persiapan laporan kepada Kementerian Keuangan
- Penarikan uang masih dapat dilakukan hingga Desember 2023
- Pemerintah harus menyerahkan laporan penyelesaian sebagai perjanjian hibah, dan Pak James dipekerjakan untuk mendukung laporan penyelesaian Pemerintah. Kontrak Pak James sampai dengan Oktober 2023
- James Bardach diharapkan datang ke Indonesia pada bulan Juli. Tim ADB bisa melakukan misi lapangan setelahnya
- Pada akhir Juli / awal Agustus draft pertama diharapkan sudah siap
- Laporan penyelesaian proyek ADB ke GEF akan menjadi tanggung jawab Bu Helena
- Tim PIU dan Pak James perlu menyepakati Outline laporan. Pak James diharapkan dapat memberikan saran outlinenya terlebih dahulu. Tim ICCTF kemudian akan melanjutkan memberikan saran outlinenya



Gambar 4. Diskusi ICCTF dengan Tim ADB dan James Bardach

#### e. Rapat Hasil Pengecekan BPK untuk Project COREMAP-CTI ADB di Gili Matra

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023 di Kantor Bappenas. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan hasil pengecekan aset COREMAP-CTI ADB oleh BPK. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Perlu dikirimkan kepada BPK beberapa dokumen sebagai berikut:
  - Surat jalan kapal pengangkut bibit karang
  - CV dan Lisensi 22 orang penyelam kegiatan coral restoration
  - Timesheet pekerja
  - Dokumen teknis pengiriman besi dan barang lainnya pertama kali ke site
  - Screenshoot foto kegiatan tgl 17 Okt 2022 (untuk membuktikan telah ada kegiatan pada tanggal 17 Okt 2022)
- BPK ingin melakukan wawancara online dengan salahsatu penyelam
- BA akan diselesaikan oleh BPK setelah semua data pendukung selesai dikumpulkan



Gambar 5. Diskusi hasil pengecekan aset COREMAP-CTI ADB oleh BPK

#### f. Rapat Agenda COREMAP-CTI ADB di Bali

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2023 di Ruang Rapat ICCTF. Agenda pertemuan ini update kegiatan COREMAP-CTI ADB di Bali. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan di Bali terdiri dari Training MSC, Exit Strategy dan Media Visit
- ToR dan undangan sudah siap
- Untuk kebutuhan media visit akan berkoordinasi dengan Vanantara
- Wartawan segera dikontak dan perlu disiapkan media briefingnya

#### g. Workshop Exit Strategy Kegiatan COREMAP-CTI ADB di Provinsi Bali

Workshop Exit Strategy dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 di Hotel Pullman, Bali. Agenda kegiatan ini adalah penyampaian exit strategy dari implementasi project COREMAP-CTI ADB di Provinsi Bali. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Outcome dari implementasi proyek COREMAP-CTI ADB adalah peningkatan kapasitas dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang di dalam serta di luar kawasan konservasi
- Urgensi dari penyusunan exit strategy ini adalah memastikan kebermanfaatannya dari capaian utama COREMAP CTI-ADB dapat sampai kepada beneficiaries proyek
- Langkah strategis akselerasi pemanfaatan capaian COREMAP-ADB:
  1. Penyediaan SDM dan pengelola manfaat
  2. Penyediaan operasional untuk memanfaatkan aset terkait
  3. Pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat pesisir setempat untuk memanfaatkan aset
- Harapan:
  1. Adanya komitmen di antara pemangku kepentingan dan kelompok terkait untuk memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang ada serta melakukan pendampingan dan meneruskan program yang sudah dilaksanakan
  2. Tersedianya mekanisme pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana hasil dari proyek yang berkelanjutan
  3. Sinergi antar pemangku kepentingan dan kelompok terkait dalam pemanfaatan dan pemeliharaan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan
  4. Perlunya dukungan dari mitra pelaksana, KKP melalui BKKPN, pemerintah daerah (provinsi, kab/kota, desa), CSR untuk keberlanjutan (al. sarpras dan pembinaan kelompok masyarakat) melalui pemanfaatan sumber dana yang ada.



Gambar 6. Peserta exit strategy mendengarkan paparan oleh Narasumber

#### h. Capacity Building on MSC Level One and Chain of Custody for Shrimp Fishery

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 26-27 Juni 2023 di Hotel Pullman, Bali. Agenda kegiatan ini adalah pelatihan MSC level satu untuk perikanan udang. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- WPP 718 merupakan area yang sangat penting baik secara ekonomis maupun ekologis. Perikanan kakap dan udang merupakan salah satu komoditi utama yang perlu didorong tata kelolanya
- Skema sertifikasi ecolabel melalui MSC merupakan salah satu opsi yang saling menguatkan dalam tata kelola Perikanan dengan pendekatan *business to business* (B2B) namun tetap memerlukan keterlibatan multi pihak
- Benefit dan tantangan dalam menjalankan FIP diharapkan memberikan gambaran besar untuk rekan-rekan HPPI ketika kembali ke kantor masing-masing untuk mempertimbangkan tergabung dalam FIP MSC
- Berdasarkan diskusi yang telah berlangsung, terdapat beberapa rekomendasi langkah tindak lanjut sebagai berikut:
  1. Perlu menginisiasi pre-assessment Perikanan udang sebagai Langkah awal dalam memetakan status terkini Perikanan udang di perairan Arafura dalam menuju FIP
  2. Perlu mengharmonisasikan update Rencana pengelolaan Perikanan di WPP 718 untuk memfokuskan Perikanan udang sebagai salah satu komoditi prioritas yang perlu dikelola
  3. Keterlibatan banyak pihak sebagai pembelajaran dari FIP di komoditi lain diharapkan juga didorong untuk Perikanan tangkap udang di Arafura. HPPI juga kedepannya perlu melibatkan mitra baik dari akademisi, NGO ataupun potensi mitra lainnya
  4. Skema dan akses pendanaan seperti yang disampaikan oleh pihak MSC menjadi potensi yang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari inisiasi memulai proses FIP kedepannya



Gambar 7. Sesi diskusi panel pada pelatihan MSC level satu untuk perikanan udang

#### i. Media Visit COREMAP-CTI ADB di Provinsi Bali

Media visit COREMAP-CTI di Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai kampanye publik dengan melakukan liputan secara intensif terhadap perkembangan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan serta memperluas pencapaian, praktik terbaik, dan perolehan pengetahuan dari proyek kepada publik dan pemangku kepentingan utama. Kegiatan dalam media visit ini meliputi:

- Kunjungan media ke lokasi proyek COREMAP-CTI di wilayah pesisir Bali dan Lombok
- Kunjungan disertai diskusi bersama tokoh adat, masyarakat, pemerintah lokal beserta lembaga masyarakat yang mendampingi
- Aset dan kelompok masyarakat yang dikunjungi dalam kegiatan ini meliputi:
  1. Menara Pantau Burung di Ceningan
  2. Bedeng Mangrove di Lembongan
  3. Pondok Informasi di Kantor UPTD Bali, Sampalan
  4. Kelompok Pengolahan Rumput Laut “Sandu Care” untuk melihat produksi Sabun Cair berbahan rumput laut
  5. Kelompok Konservasi Terumbu Karang “Nuansa Pulau” di Desa Ped, Nusa Penida
- Tindak lanjut yang diharapkan dari media visit ini adalah terliputnya kegiatan ICCTF di berbagai media nasional baik cetak maupun elektronik



Gambar 8. Kunjungan media ke menara pantau burung di Ceningan

## 2. BLUE CARBON



### a. **Presentasi Output Konsultan Blue Carbon**

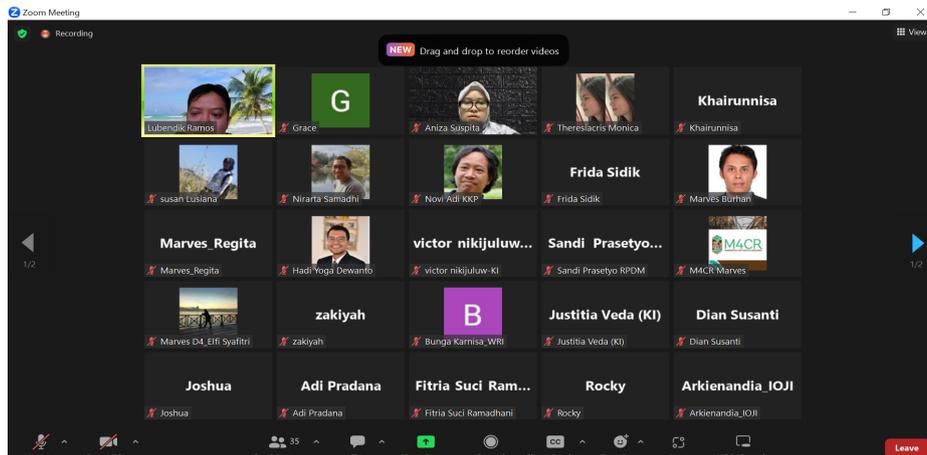
Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah presentasi pekerjaan penyusunan TOR Blue Carbon AFD. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- ToR Paket 1 adalah pendekatan kebijakan, sementara Paket 2 akan fokus pada pendataan, pelaporan, dan verifikasi, di 3 lokasi terlebih dahulu, dan harapannya bisa direplikasi ke lokasi yang lain
- Yang dimaksud dengan blue carbon tenure adalah mendapatkan masukan bagaimana memasukan involving community dalam skema Blue Carbon, ini merupakan inisiatif karbon biru yang bisa lebih menyentuh masyarakat. Sudah banyak berjalan namun tidak banyak di mainstream
- Pada Paket 2 capacity buildingnya perlu di adjust karena masih pada level trial
- Perlu ditambahkan metode lain selain VCS untuk menjaga netralitas
- Perlu ditambahkan elaborasi tentang successful project dan metode yang dipropose perlu didetailkan
- Revisi ToR oleh Pak Bara akan dikirim dalam 2 minggu

### b. **Undangan Kemenkomarves: Rapat Sekretariat National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP)**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah sosialisasi mengenai sekretariat National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP) dan pembahasan rencana kunjungan tim World Economic Forum (WEF) di bulan Mei. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Adanya signing antara Kemenkomarves dan WEF pada awal januari 2023
- NBCAP bagian dari Pokja Mangrove nasional dan NBCAP akan berkoordinasi dengan inisiatif blue carbon lainnya di lingkup nasional
- Kunjungan WEF ke Indonesia direncanakan pada tanggal 22-25 Mei 2023. Kunjungan WEF ini untuk menindaklanjuti kerjasama NBCAP dan berdiskusi mengenai inisiasi program blue carbon
- Perlu adanya update terkait tema, output yang diharapkan, dan target sehingga dapat merumuskan susunan acara yang dapat mencakup kebutuhan para pihak
- Perlu adanya kesamaan terminologi dalam penyusunan sekretariat NBCAP



Gambar 9. Diskusi agenda WEF oleh peserta rapat

### c. Undangan KKP: Rapat Penyusunan Profil Emisi, Mekanisme MRV dan Strategi Pembiayaan Karbon Biru

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 16-17 Mei 2023 bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta. Agenda pertemuan ini adalah diskusi terhadap strategi profil emisi blue carbon di Indonesia dan proyeksinya. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Ocean sector yang difokuskan saat ini adalah blue carbon
- Karena blue carbon masih baru sebagai part of ocean (mendampingi green carbon sebagai part of forest), diperlukan inventarisasi nasional terhadap profil emisi blue carbon, mekanisme MRVnya dan carbon pricing
- Dalam konteks nasional, perlu metodologi yang terstandarisasi
- Profil dan baseline untuk mangrove sudah clear, untuk lamun akan dipakai yang seluas 1,8 juta ha berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh KKP.
- Terkait MRV akan lebih banyak memodifikasi MRV dari green carbon, kemudian akan di SNI-kan
- Terkait carbon pricing, dalam market dan non-market based mechanism akan digunakan beberapa prinsip. Pertama adalah prinsip inclusive dan kedua sifatnya ecosystem services valuation
- KKP akan punya dokumen untuk blue carbon policy terkait kick off meeting 2024



Gambar 10. Peserta rapat mendengarkan pemaparan dari Narasumber

**d. Kick-Off Meeting Project Blue Carbon Bappenas-ICCTF dengan AFD**

Kick-Off Meeting Project Blue Carbon dengan tema “Integrasi Karbon Biru dalam Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia” dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Hotel Pullman, Jakarta. Agenda pertemuan ini adalah seremonial peluncuran project blue carbon AFD dan diskusi panel bersama para ahli kebijakan blue carbon. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Semua program yang telah disampaikan dan sedang diupayakan oleh seluruh K/L terkait pada dasarnya merupakan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita ekosistem karbon biru yang sehat dan berkembang
- Sebuah pencapaian yang signifikan bagi bangsa ini dalam rangka pengelolaan ekosistem karbon biru, apabila memiliki roadmap, baseline, panduan MRV dan pembaruan target NDC yang memasukan ekosistem karbon biru sebagai salah satu prioritas untuk penurunan emisi pada pencapaian target NDC. Harapannya pada 2<sup>nd</sup> NDC di 2024 hal ini bisa tercapai
- Panduan untuk menyusun MRV Karbon Biru telah tersedia pada panduan IPCC



Gambar 11. Pemukulan Gong oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas sebagai simbolis dimulainya project

- untuk wetland, *blue print*-nya juga sudah tersedia untuk diimplementasikan di Indonesia, tinggal bagaimana kita bisa kembangkan untuk kepentingan nasional, khususnya untuk ekosistem karbon biru yang masih belum terakomodasi, seperti mangrove di lahan bekas tambak, rawa, dan padang lamun
- *Concern* dan *willingness* untuk bekerja pada pengelolaan ekosistem karbon biru telah tersebar pada berbagai instansi dan pemangku kepentingan nasional dan daerah, kolaborasi dapat menjadi benefit untuk akselerasi cita-cita bersama untuk ekosistem karbon biru, namun bisa juga menjadi kelemahan apabila tidak diimplementasikan dengan koordinasi yang baik
- Pendanaan dari AFD bisa menjadi peluang untuk akselerasi pencapaian dalam pengelolaan ekosistem karbon biru, ICCTF Bappenas berkomitment untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya serta para pihak untuk isu pengelolaan ekosistem karbon biru
- Pelaksanaan proyek kerjasama ICCTF-Bappenas dan AFD ini dapat menguatkan inisiatif-inisiatif untuk pengelolaan ekosistem karbon biru yang telah dilakukan oleh berbagai instansi nasional dan daerah, serta target pencapaian nasional lainnya seperti roadmap, panduan MRV nasional dan inklusi Karbon Biru sebagai salah satu langkah prioritas untuk penurunan emisi pada pencapaian NDC

#### e. Diskusi Metode dan Pemilihan Lokasi Feasibility Study Project AFD - NIRAS

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah diskusi bersama NIRAS terkait metode dan pemilihan lokasi feasibility study. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Telah ada diskusi antara BAPPENAS dan AFD tentang pemilihan lokasi dan preferensi proyek karbon biru yang responsif gender di Indonesia
- ICCTF-Bappenas tidak memiliki concern khusus dalam pemilihan lokasi dan menyerahkan kepada tim ahli NIRAS untuk penyempurnaan metodologi dan pemilihan lokasi. Namun, justifikasi pemilihan lokasi tetap harus kuat dan tercantum dalam interim report
- Untuk mengakomodir preferensi atas area lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dalam TOR (Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Utara, Papua Barat), NIRAS akan menggunakan provinsi-provinsi ini untuk melalui analisis multikriteria tahap berikutnya
- Untuk analisis tentang pilihan mata pencaharian, pemilihan akan didasarkan pada karakteristik mata pencaharian masing-masing provinsi – jika memungkinkan hingga ke tingkat kabupaten
- Kajian gender yang dilakukan di tiap lokasi adalah Gender Development Index, Gender Empowerment Index, Human Development Index, dan Gender Inequality Index
- Terkait kajian manajemen resiko lingkungan dan sosial, pemilihan akan mempertimbangkan lokasi yang tidak berdekatan atau berada di kawasan lindung sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 PP 22/2021, dan kawasan pemukiman

#### f. Rapat dengan AFD

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 di Ruang Rapat ICCTF. Agenda pertemuan ini terkait Mission Mr. Oscar dari AFD ke Indonesia. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Penelitian utama AFD di KLHS: lintasan pembangunan rendah karbon; menghubungkan ketidaksetaraan, lingkungan, dan perlindungan sosial; mempromosikan konsep ekonomi biru di persimpangan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan; mengidentifikasi risiko terkait alam untuk mengurangi ketergantungan dan dampak



Gambar 12. Diskusi Bappenas-ICCTF dengan AFD

- Blue Carbon AFD membantu Indonesia dalam pengembangan Pasal 6 dari kesepakatan COP 27, yang masih dalam proses pengembangan. Di akhir prosedur, ada kemungkinan kami dapat menghasilkan kredit karbon
- AFD dan Bappenas akan berdiskusi lebih lanjut terkait peluang potensi yang dapat dijalin kedepannya, terutama pada bidang yang sesuai dengan prioritas AFD di South East Asia

## 2. BLUE FINANCE



### a. **Undangan Kemenkeu: Rapat SDGs Bond Allocation and Impact Report 2023**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 4 April 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah mendengarkan pemaparan SDGs Bond oleh Kemenkeu. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- 1 tahun setelah penerbitan SDGs Bond diperlukan adanya impact report untuk dilaporkan kepada para investor dalam membuktikan komitmen pemerintah
- Impact report bisa menjadi pengakuan kontribusi dari K/L Lembaga dalam pencapaian SDGs secara nasional dan menjadi manfaat untuk K/L
- 3 fokus utama: green, blue, social. SDGs Bond fokus social karena sudah ada green bonds dan nanti akan ada blue bonds
- Sifat pembiayaan ada general financing dan project financing. SUN lebih banyak general financing, seluruhnya masuk rekening kas umum negara dan blended dengan seluruh penerimaan negara, digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum
- SDGs Bond/Tematik Bond menggunakan prinsip underlying kegiatan. Penyusunan impact report digunakan untuk mencari kegiatan/ouput yang dapat dianggap strategis/menjual menjadi underlying kegiatan untuk penerbitan SDGs Bond.
- Semakin ke depan, investor akan meminta impact dari pendanaan sehingga Tematik Bond sangat diperlukan

### b. **Rapat dengan Konsultan Blue Finance WB**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 4 April 2023 di Ruang Rapat ICCTF. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan Advisory Committee dan agenda Pak Neel dalam kunjungannya ke Indonesia. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Pak Neel akan tiba di Jakarta pada tanggal 8 April, lalu rapat dengan WB pada hari Senin tanggal 10 April, lalu tanggal 11 April rapat dengan ICCTF, lalu tanggal 12 April dilanjutkan rapat terkait blue finance advisory committee, kemudian tanggal 13 April rapat dengan Kemenkeu dan tanggal 14 April rapat dengan KKP
- Pak Neel akan ke Lombok untuk kunjungan ke MPA Gili Matra sebagai salah satu MPA yang akan di intervensi oleh KKP di proyek LAUTRA, kemudian dilanjutkan meeting pada tanggal 17 dan 18 April
- Dalam Advisory committee akan ada eselon 1 dan akan didukung oleh teknikal committee (teknikal level), yang pada dasarnya adalah level direktur

- Perlu di highlight ekspektasi output yang diharapkan dari blue finance advisory committee dan apa perbedaannya dengan task force atau platform yang lainnya
- Untuk bahan meeting dengan KKP terkait dengan kebutuhan data sudah disusun dalam bentuk matrix

### c. FGD Advisory Committee Project LAUTRA

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 12-13 April 2023 di Hotel Pullman Jakarta. Agenda pertemuan ini adalah konsultasi untuk membahas rencana pembentukan Advisory Committee serta sinkronisasi antara jadwal penyusunan dokumen dengan jadwal penerbitan instrumen keuangan negara. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan pendanaan biru dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan melalui APBN. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Indonesia sudah menyusun panduan pendanaan biru yang dapat di aplikasikan untuk sovereign dan non-sovereign instrument
  - Component 3 LAUTRA yang akan diimplementasikan oleh ICCTF merupakan dukungan terhadap pengembangan pendanaan biru melalui penyusunan *tools* dan *framework* serta lingkungan yang mendukung pengembangan pendanaan biru secara nasional
  - Pembentukan komite penasihat pendanaan biru sangat strategis dan penting sesuai dengan arahan nasional. Untuk itu pembentukan pasihat pendanaan biru memerlukan dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan kunci seperti kementerian keuangan, kementerian kelautan dan perikanan dan sektor financial.
- Beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau konsen terhadap pentingnya pembentukan advisory committee ini diantaranya:
    1. Berbagai inisiatif dan aktivitas dalam keuangan biru membutuhkan koordinasi dan bimbingan yang efektif
    2. Keterbatasan alat, kerangka kerja dan arahan kebijakan untuk implementasi keuangan biru
    3. Kebutuhan untuk mengintegrasikan pembiayaan berkelanjutan ke dalam tujuan nasional
  - Ada 3 strategy financing. Ada kesempatan untuk kontribusi, baik di proses yang sedang berjalan untuk blue bond kemudian juga proses ruang diskusi sudah dibuka untuk sukuk Bersama sama mendiskusikan apa yang bisa dikolaborasikan
  - Untuk strategi livelihood dan UMKM, ada banyak hal yang bisa di diskusikan dengan OJK, dan mungkin akan lebih luas lagi stakeholdernya bukan hanya Bank akan tetapi juga dengan yang non-Bank
  - Sebagai tindak lanjut Deputy KSDA Bappenas akan mengirimkan surat kepada Lembaga terkait untuk menjadi bagian dari Blue Finance Advisory Committee dan akan dilakukan diskusi lanjutan dengan FCI



Gambar 13. Diskusi pembahasan Advisory Committee oleh peserta rapat

#### d. Rapat Komponen 3 LAUTRA dengan KKHL

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023 di KKP. Agenda pertemuan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan data pada Komponen 3 LAUTRA. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Output Komponen 3 meliputi:
  1. Subkomponen penguatan pendanaan biru: pembentukan komite blue finance, draf regulasi, rekomendasai kebijakan BK dan penyusunan monitoring dan reporting framework investasi Blue finance
  2. Subkomponen livelihood: penyusunan strategi pendanaan biru, sarpras di pesisir dan UMKM. Akan disusun 2 proposal, instrument dan sukuk
- Penyusunan Financing Strategy: informasi yang dibutuhkan adalah penggunaan dana, jumlah dana, karekteristik capitals. Langkah-langkah mitigasi dan resiko termasuk opsi penyaluran pendanaan
- MPA Financing gaps meliputi establishment cost (*concern* utama) dan management cost
- Informasi lain: capital requirement, pendapatan dari masing-masing MPA
- Data yg telah dijabarkan adalah bagian dari mitigasi untuk memetakan data yang tersedia di lapangan sehingga bisa dibuat strategi jika data tersebut tidak tersedia
- Informasi yang dibutuhkan terkait Infrastruktur Pesisir. Infrastruktur ini tidak hanya di kawasan konservasi tetapi lebih luas juga untuk livelihood, yang difokuskan kepada:
  1. SDA seperti perikanan berkelanjutan, budidaya dan rumput laut atau pemanfaatan yg ada di kawasan tersebut
  2. Pengendalian polusi
  3. Pembangunan pesisir dan laut yang berkelanjutan



Gambar 14. Diskusi pembahasan Komponen 3 LAUTRA oleh peserta rapat

e. **Rapat Blue Finance dengan Konsultan Blue Finance**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah diskusi terkait dengan rencana hiring konsultan Pendanaan Berkelanjutan. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- ICCTF saat ini sedang mengerjakan program Pendanaan biru berkelanjutan/sustainable blue financing
- Program/ inisiatif ini tidak melakukan pekerjaan di lapangan. Akan lebih banyak bekerjasama dengan Lembaga pemerintah, Lembaga keuangan seperti OJK, Bank Indonesia, BKF, dan LPS
- Aktor utama di kementerian adalah KKP dan Kemenkeu
- Saat ini dibutuhkan seorang untuk menjembatani komunikasi, diskusi dan pembentukan inisiatif pendanaan berkelanjutan dengan Kementerian/Lembaga
- Pekerjaan yang akan dilakukan adalah memastikan bahwa komunikasi dengan Lembaga tersebut terbentuk dan bahkan menjadi lebih baik. Salah satunya adalah pembentukan komite nasional
- Sebagai tindak lanjut ToR akan segera disusun
- Perihal administratif akan dikomunikasikan dengan staf ICCTF yang bertugas

f. **Pembahasan Blue Finance di Hotel Pullman, Bandung**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah mendengarkan pemaparan SDGs Bond oleh Kemenkeu. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Pada 2022 lalu INFF diluncurkan di Bali. INFF sebagai umbrella untuk stakeholder dalam mendvelop enabling ecosystem
- SDG bond/sukuk menggunakan pengeluaran yang memenuhi syarat untuk fokus sosial.
- Green dan Blue bond/sukuk memanfaatkan pengeluaran yang memenuhi syarat untuk fokus Green and Blue
- Pemerintah harus solid terkait substansi untuk memastikan investor's confidence
- Kita bisa mengenali mulai dari blue focus kita sandingkan dengan guideline yang ada. Paling tidak ada 7 K/L terlibat. Intinya memperkuat yang sudah ada (tidak membuat baru).
- Antar Kementerian harus bisa bicara lebih terbuka
- Terkait dynamic tagging, pada prinsipnya menggunakan KRISNA. Oleh karena itu Bappenas mempunyai otoritas.
- Exercise pemetaan RO K/L potensial masih akan disisir kembali oleh Tim SDG.
- Tim SDG juga akan mencoba membuat guidance dan kemudian mengkomunikasikannya dengan K/L

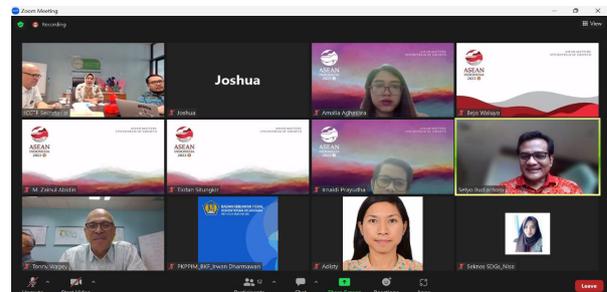


Gambar 15. Diskusi Bappenas-ICCTF dengan Tim SDG

#### g. Rapat dengan BKF

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah audiensi Bappenas-ICCTF dengan BKF. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- BKF sebagai instrument tagging yang sudah mengeluarkan SDGs Bond masih memiliki sedikit climate issues meskipun framework besarnya adalah SDGs
- Dalam waktu dekat Samurai Blue Bond akan diterbitkan
- Basis pembiayaan adalah climate budget tagging. Konsep CBT adalah tools untuk identifikasi kebutuhan dari APBN
- Tagging adalah suatu proses di hilir. Ketika K/L berencana dan penganggaran baru dilakukan tagging. Idealnya K/L merencanakan sesuai tugas dan fungsi yang selaras dengan isu-isu perubahan iklim.
- Tagging bisa diproses setelah trilateral meeting Bappenas dengan DJA Kemenkeu
- Hasil penandaan/tagging yang sudah dilakukan BKF untuk Blue Bond pada konsepnya baru mencakup isu sektor yang hanya terkait dengan perubahan iklim, belum Blue secara umum. Pengembangan isu Blue secara lebih luas berpotensi akan membuat aktivitas public dan pendanaan semakin massive.
- Proses penandaan biru perlu dipertajam lagi terkait dengan keyword-keywordnya. Platform/ modal sudah ada dari BKF dan Bappenas. Green Book dan Blue Book harus menjadi permulaan dalam tagging project.



Gambar 16. Audiensi dengan BKF

#### h. Rapat dengan DJKN

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah diskusi terkait Ocean Account. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- DJKN saat ini sedang melakukan harmonisasi dengan RUU, untuk itu kami perlu menyampaikan keterkaitan dengan sumber daya alam. Dalam RUU ini ada 3 unsur penilaian, yaitu bidang properti, bisnis, dan sumber daya alam
- Sampai dengan hari ini neraca SDA yang sebagian sedang disusun BPS, valuasi-valuasinya banyak melibatkan metode. DJKN ingin standar yang dipakai adalah standar internasional agar nilai bisa diakui lebih luas. Namun data masih menjadi tantangan
- Terkait blue carbon perlu berangkat dari uji metodologi, karena berapa luas mangrove, dan berapa luas lamun, beberapa institusi yang memiliki data yang berbeda
- Mengenai karbon yang trendnya lagi naik adalah coastal carbon, yang artinya hanya di batas pesisir saja. ICCTF sedang menyusun pedoman monitoring reporting dan evaluation (MRV)
- Aset terbagi menjadi dua, yang dimiliki dan yang dikuasai. Ini penting dalam menyusun potensi fiskal kita
- Terkait valuasi, DJKN akan mendirikan Majelis Penilai Indonesia. Disinilah komite ini bertugas menentukan. Tentunya dengan standar internasional yang menyesuaikan dengan keunikan-keunikan yang ada di negara kita
- Dalam konsep RUU, Majelis ini terdiri dari 13 unsur. 5 dari pemerintah, 5 dari publik, dan 3 dari akademisi. Kemenkeu sebagai leadnya. Tetapi diluar Majelis juga ada komite-komite yang melibatkan dari banyak sisi sehingga setiap pengambilan keputusan akan didiskusikan bersama

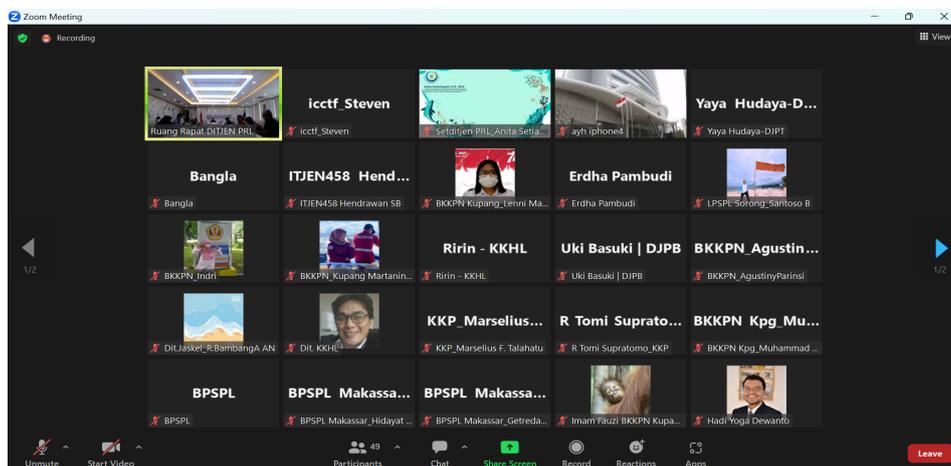


Gambar 17. Pembahasan Ocean Account dengan DJKN

#### i. Rapat LAUTRA Pembahasan Komponen 1 dan 2

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan Komponen 1 dan 2 project LAUTRA. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Perlu ada tempat dokumentasi LAUTRA mulai dari awal hingga akhir, sehingga mudah pada saat di periksa atau Audit
- Proses procurement sudah akan dimulai pada tahun ini. Sehingga pada tahun 2024, sudah ada SDM yang dapat menjalankan kegiatan misalnya kajian-kajian, dll.
- 15 Kawasan Konservasi akan menjadi lokasi intervensi prioritas di tahun pertama
- Penyusunan AWP tahun 2023 dan 2024 akan disusun oleh masing masing PIC dan sudah disiapkan templatnya
- Perlu diskusi dengan Komponen 3 untuk diskusi terkait dengan dukungan. Pembahasan akan dilakukan di pertemuan selanjutnya



Gambar 18. Diskusi LAUTRA Komponen 1 dan 2

#### j. Rapat Diskusi Blue Finance dengan Deputi KSDA dan SDG

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 di The Stone, Bali. Agenda pertemuan ini adalah penyampaian perkembangan mengenai irisan program Blue Finance ICCTF dengan SDG Secretariat terkait pendanaan biru yang selama ini dikolaborasikan. ICCTF berfokus pada program-program yang telah dilaksanakan, dan proyek-proyek yang berkaitan dengan Blue Finance, sementara SDGs Secretariat akan *highlight program underlying* program Blue di APBN di Indonesia. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Masukan-masukan harap dikumpulkan agar agenda dan RAB segera difinalkan
- Kegiatan yang dihandle oleh Dit. KP saat ini ada 4-5 side event.
- Mengenai blue carbon salah satu yang bisa diangkat adalah success story di bekas tambang timah

- Progress di project LAUTRA beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan tanda-tangan. Tahap selanjutnya adalah terkait keperluan Advisory Committee
- Sudah dilakukan pembicaraan dengan Keuangan, OJK, dan SDG untuk saling mengisi.
- Samurai totalnya 104,8 milyar yen = 11,3 triliun rupiah. Yang blue bond sekitar 20,7 milyar
- Sekretariat SDG sudah mengumpulkan RO terkait blue, ada 4 kementerian dengan total 15 triliun. Kemudian setelah dihitung kembali ada hampir 6 triliun yang murni.
- Skema blue bond diharapkan dapat lebih luas lagi. Sempat dibahas ada yang pure sovereign dan ada yang “hybrid”.
- ICCTF diharapkan kedepan bisa lebih berkiprah mengingat ada beberapa Pokja yang masih bisa digerakkan.
- Untuk menggerakkan orang-orang di Bappenas, ICCTF bisa berperan sebagai wadah



Gambar 19. Diskusi dengan Deputi KSDA Bappenas dan Sekretariat SDG

#### k. Rapat LAUTRA Pembahasan Output dan Anggaran PHLN

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023 di Kantor KKP. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan rincian output dan anggaran PHLN 2023. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Progress NOL untuk AWP belum ada karena AWP nya perlu lebih dahulu diupdate kemudian diusulkan Kembali
- Perlu menambahkan RO baru di eselon 1. Isi anggaran yakni dari AWP. Distribusi setiap eselon 1 perlu diperjelas
- RO harus terpisah dari project eksisting. Di RO perlu mencantumkan nama proyek
- Status anggaran tahun 2023 masih dapat di tambahkan
- DJPRL sudah ada rumah nya sekitar 100 juta. Dan hal ini masih bisa di tambahkan dalam jangka waktu sampai dengan desember 2023
- DJPB saat ini untuk tahun 2023 belum ada cantolan nya, akan tetapi untuk tahun 2024 sudah disiapkan

- DJPT saat ini belum ada RO. DJPT ada dua komponen yakni di SDI dan PDK terkait dengan Kalaju
- Sudah ada RO dan KSO akan tetapi cantolan DIPA belum ada
- Terkait dengan pembukaan REKSUS. Sebaik nya satu REKSUS saja antara KKP dan Bappenas, karena DIPA nya masing-masing
- Initial deposit tidak ada batasan persentasenya



Gambar 20. Pembahasan LAUTRA oleh peserta rapat

#### I. Rapat LAUTRA Pembahasan Finalisasi AWP

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2023 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan rincian output dan anggaran PHLN 2023. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Beberapa hal yang perlu dicermati dalam mengupdate AWP, antara lain: (i) perlu melihat output nya terukur, (ii) hasil project nya dapat berkelanjutan, (iii) indicator secara global atau IKK yang sduah di sepakati perlu di cek kembali, (iv) fase kegiatan akan berkaitan dengan waktu
- AWP diharapkan dapat selesai Juni sehingga Juli bisa diajukan dan Agustus-Desember implementasi dapat mulai dilakukan
- Pada Q3 dan Q4 tahun ini akan focus ke procurement PIU dan Specialist
- Komponen 3 saat ini masih ada revisi terutama di bagian schedule, sedangkan procurement ada perubahan pada penambahan satu kegiatan dan pengurangan nominal
- AWP akan segera disubmitke PMO dan ke WB untuk mendapatkan NOL

# B | PROGRAM STRATEGIS, POTENSI KERJASAMA DAN PENGGALANGAN DANA

## a. Capacity Building on Fisheries Management di Jepang

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15-19 Mei 2023 di Jepang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat peran Pemerintah Jepang dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Hasil dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Jepang mendukung dengan baik pembangunan perikanan dalam konteks perikanan tangkap (seperti pembagian kuota, penempatan alata tangkap, hak nelayan, pengelolaan pelabuhan), pengembangan koperasi perikanan, pengolahan, pemasaran dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Berdasarkan pengamatan, hal itu dapat terwujud karena didukung dengan kondisi sebagai berikut:

1. Kewenangan dalam pembangunan perikanan di Jepang terbagi habis antar sistem pemerintahan (pusat, provinsi dan kota)
2. Pelaksanaan tugas fungsi berlangsung dengan baik dalam konteks sebagai regulator, fasilitator, pembinaan, pengendalian dan pengawasan
3. Kelembagaan dan kerjasama pemanfaatan/pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah antara pemilik dan pengelola berjalan dengan baik

Dalam konteks perencanaan pembangunan perikanan, terdapat beberapa hal menarik yang mendukung pelaksanaannya berjalan dengan, kondisi tersebut adalah:

1. Adopsi budaya luhur Jepang yang sudah berumur ratusan tahun dalam pengembangan perencanaan program pembangunan perikanan
2. Mendorong koperasi perikanan sebagai aktor penting usaha perikanan menjadi profesional dan mampu melaksanakan langkah-langkah korporasi yang bertujuan antara lain (a) meningkatkan pembagian keuntungan pada anggota koperasi, (b) mempengaruhi bisnis untuk meningkatkan kinerja koperasi dan keuntungan anggota, dan (c) merger antar koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan peningkatan kinerja koperasi



Gambar 21. Misaki wholesale Fishmarket

Selanjutnya dalam bidang pengolahan, pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk perikanan di Jepang terlihat beberapa keunggulan di Jepang yang dapat dipelajari dan diadopsi di Indonesia menyesuaikan karakteristik masing-masing negara, sebagai berikut:

1. Komitmen dalam memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, yang meliputi standar bangunan, standar peralatan, standar air, standar operasi sanitasi, standar higienis personil, dll
2. Implementasi rantai dingin berjalan dengan baik disepanjang rantai pasok (supply chain) ikan
3. Kemudahan memperoleh sertifikasi produk perikanan, bahkan sudah ada yang menerapkan sertifikasi lingkungan sukarela pada produk perikanan (MSC, ASC dan MEL)
4. Diversifikasi produk perikanan yang dikembangkan dengan mengakomodasi strategi bottom up dan pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasinya
5. Kondisi logistik ikan yang baik, dalam konteks penyediaan sarana prasarana, konektivitas antara wilayah produsen dengan konsumen dalam satu atau antar kota, perfectur berjalan dengan baik, sistem informasi logistik juga terkoneksi sehingga produsen dapat mengembangkan strategi panen untuk mengendalikan pasokan dan harga
6. Penggunaan teknologi yang baik, misalkan dalam pengolahan dan pembekuan hasil perikanan serta lelang elektronik
7. Pemasaran produk di Jepang sangat inovatif, menarik dan sesuai dengan preferensi konsumen



Gambar 22. Pelelangan Tuna di Misaki Wholesale Market

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dalam pembangunan perikanan di Indonesia untuk setidaknya dapat mengimbangi Jepang, adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian untuk mutakhir pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
2. Penguatan peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, pembinaan, pengendalian dan pengawasan operasionalisasi pasar ikan
3. Adopsi budaya daerah di Indonesia yang sangat banyak dan sudah mengakar di masyarakat dalam perencanaan pembangunan perikanan
4. Penguatan peran koperasi perikanan Yang ada di Indonesia seiring dengan implementasi Major Project Korporasi Petani dan Nelayan
5. Memperkuat bidang pengolahan, pemasaran hasil perikanan seiring dengan produksi perikanan dalam hal standar mutu dan keamanan hasil perikanan, implementasi rantai dingin disepanjang rantai pasok hasil perikanan, kemudahan

sertifikasi produk perikanan, diversifikasi produk perikanan bernilai tambah, penguatan logistik hasil perikanan, penggunaan teknologi serta pemasaran yang inovatif, menarik dan memenuhi ekspektasi konsumen



Gambar 23. Pembesaran abalone di Koperasi Higashi Awa

**b. Exchange Knowledge in Marine Protected Areas and Sustainable Fisheries Management di Australia**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12-14 Juni 2023 di Australia. Tujuan kegiatan adalah untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik untuk memperkuat pengelolaan dan pendanaan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan, serta dapat menjadi masukan untuk RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Hasil dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan kawasan konservasi dan budidaya udang berjalan dengan baik.



Gambar 24. Foto bersama sharing knowledge pengelolaan Great Barrier Reef Marine Park

Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi, Pemerintah Federal Australia membentuk *The Great Barrier Reef Marine Park Authority* yang merupakan lembaga khusus untuk mengelola kawasan *Great Barrier Reef*. Berdasarkan pengamatan, pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan dengan:

1. *The Great Barrier Reef Marine Park Authority* memiliki berbagai rencana strategis seperti *Reef 2050 Long Term Sustainability Plan* yang merupakan dokumen

perencanaan jangka panjang untuk memastikan ketahanan ekosistem dalam menghadapi ancaman. Dokumen tersebut juga menjelaskan prioritas investasi yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang telah diidentifikasi

2. Penyusunan rencana zonasi (*Zoning Plan*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan 300 Konsultasi Publik dan masukan sebanyak 30.000. Melalui proses yang terbuka dan

partisipatif, *The Great Barrier Reef Marine Park Authority* tidak perlu melakukan perencanaan zonasi baru sejak tahun 2004

3. Pembentukan zona inti (*Green Zone*) yang terbukti memberikan manfaat dalam konservasi spesies perikanan dan memberikan efek *spillover* ke wilayah yang diizinkan untuk kegiatan penangkapan ikan
4. *The Great Barrier Reef Marine Park Authority* melibatkan masyarakat pribumi (*First Nation People*) yang berada di sepanjang pesisir *The Great Barrier Reef* untuk mempertahankan nilai-nilai kultural dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara tradisional. Selain itu, *First Nation People* juga dilibatkan dalam pengawasan kawasan sebagai *Land and Sea Ranger*
5. Pengelola juga memiliki sarana prasarana pengawasan yang memadai. Hal ini ditandai dengan adanya 21 kapal pengawas yang melakukan operasi pengawasan di seluruh kawasan *The Great Barrier Reef*. Sarana prasarana tersebut diperkuat dengan sumber daya yang memadai sehingga satu kapal pengawas dapat melaksanakan 150 hari operasi

Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang memastikan bahwa target kawasan konservasi perairan juga sejalan dengan target luasan dan pemanfaatannya agar keseimbangan antara pertumbuhan



Gambar 25. Foto bersama field visit ke James Cook University

ekonomi dan kualitas lingkungan hidup dapat tercapai. Dokumen perencanaan tersebut perlu diturunkan sampai tingkat Kementerian dan Pemerintah Daerah

2. Peningkatan riset serta pengolahan data dan informasi untuk mengetahui efek *spillover* kawasan inti konservasi perairan terhadap kawasan penangkapan ikan. Hal ini perlu dilaksanakan untuk meyakinkan industri penangkapan ikan untuk menjaga kawasan inti dan tidak melakukan penangkapan ikan yang ilegal dan tidak sesuai rencana zonasi
3. Pelibatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berada di wilayah Kawasan Konservasi Perairan, khususnya dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pemanfaatannya secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan MHA
4. Peningkatan jumlah sarana prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta jumlah hari operasinya untuk memastikan bahwa seluruh wilayah dapat tetap terjaga dari tindakan ilegal dan destruktif. Selain itu, peran masyarakat pesisir perlu ditingkatkan untuk membantu proses pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan perikanan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *review* terhadap kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan memiliki keterkaitan yang erat dengan permintaan industri perikanan
2. Peningkatan kualitas rencana riset agar menarik perhatian lembaga riset dan industri dalam memberikan pendanaan. Selain itu, riset juga perlu diarahkan
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana laboratorium untuk menarik minat mahasiswa internasional dalam melakukan riset di Indonesia. Dengan adanya mahasiswa internasional, maka mahasiswa Indonesia juga akan semakin tertantang dalam melakukan penelitian karena adanya lingkungan yang kompetitif di dalam perguruan tinggi

### c. Rapat Aquaculture

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023 di Hotel Sari Pacific Jakarta. Agenda pertemuan ini adalah pembasan costing aquaculture. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- International consultant bisa dilakukan jika memang ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Indonesia dengan konfirmasi KKP. Perlu informasi *clear* dari ADB terkait International Consultant. International Consultant diperlukan seperti pada kegiatan *mass balance* tapi posisi hanya sebagai anggota saja, leadernya tetap national consultant sehingga tidak menggerus anggaran
- Workshop dan travel bisa dimasukkan dalam kegiatan consulting firm. ADB perlu tau bahwa akan ada international travel
- Subgrant universitas sebesar 50 ribu untuk masing-masing universitas. Jumlah universitas akan kembali disesuaikan sehingga tidak memakan banyak budget. Jumlah 8 universitas saat ini masih terlalu banyak dan sulit dikontrol



Gambar 26. Diskusi costing aquaculture oleh peserta rapat

a. **Kunjungan Lapang Diskusi Pengelolaan MPA di Gili Matra**

Kunjungan Lapang ini dilaksanakan pada tanggal 14-16 April 2023 di Gili Matra, NTB. Agenda Kunjungan Lapang ini adalah diskusi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Gili Matra, termasuk pengecekan infrastruktur/asset MPA di Gili Matra. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Project COREMAP-CTI ADB akan selesai projectnya pada tahun ini, oleh karena itu diperlukan exit strategy yang dapat menjamin pemanfaatannya dapat berlanjut baik
- Terdapat 3 pendekatan dalam peningkatan program yakni membangun model, menyempurnakan kelembagaan di level provinsi untuk pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas SDM
- Untuk program livelihoods, diperlukan strategi bisnis terutama dalam hal marketing. Terutama program program dari Pemda perlu mengedepankan pendampingan livelihoods masyarakat
- Terdapat Gap antara Pemda dan masyarakat Gili. Pemda memungut PAD kepada masyarakat secara rutin, akan tetapi belum pernah ada bantuan dari Pemda untuk masyarakat, terutama untuk Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan
- Di Gili Trawangan terdapat local NGO beranggotakan orang-orang asing yang menggalang donasi dengan mengambil fee dari setiap penyelam sebesar Rp. 50.000/diver. Infonya fee ini diperuntukan untuk rehabilitasi, pengelolaan sampah di pulau serta untuk program health animal seperti kuda. Akan tetapi donasi yang sudah dikumpulkan tidak pernah disampaikan laporannya.
- Informasi terkait dengan jumlah pengunjung bisa di dapatkan. Akan tetapi terdapat kemungkinan ada perbedaan data antara tourism agency dan Syahbandar port agency. Syahbandar punya manifest, tapi tourism agency punya data jumlah turis yang masuk ke lokasi wisata masing masing. Di pengelola MPA juga memiliki data, akan tetapi kemungkinan biasanya ada karena di Dive operator tidak memberikan data yang benar.



Gambar 27. Rapat antara ICCTF dengan para pemangku kepentingan pada tanggal 14 April (kiri) dan 15 April (kanan)

### c. **Pembahasan Rencana Kerjasama Hibah KONEKSI**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah mendengarkan pemaparan mengenai Hibah KONEKSI. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Tujuan dari adanya kegiatan Hibah KONEKSI adalah mendukung kemitraan kelembagaan (institutional linkages) dan perorangan (people to people) antara Indonesia dan Australia. Saat ini sponsorship partner untuk Hibah KONEKSI yaitu DFAT Australia selama 5 tahun (2023 – 2027) dengan total nilai hibah sebesar AUD50 juta. Kemen PPN/Bappenas selaku koordinator dan K/L pelaksana terdiri atas Kemdikbudristek, BRIN, Kemen PPN/Bappenas
- Hal yang perlu diperhatikan untuk hibah KONEKSI nantinya adalah 1) relevansi dengan peran Bappenas sebagai lembaga think tank perumusan kebijakan nasional, 2) memiliki manfaat bagi proses penyusunan dan ketercapaian sasaran RPJPN dan RPJMN, 3) usulan kegiatan dapat merupakan kombinasi dari 4 jalur layanan yang disediakan, 4) kegiatan dapat dilaksanakan lintas tahun dan paling cepat dimulai pada Julul 2023
- Terhadap tanggapan yang diberikan oleh Dit. KP atas 3 usulan (akuakultur, *bluecarbon*, dan MPA). Dit. PTI menanggapi bahwa 1) perlu dipastikan bahwa kegiatan yang diusulkan merupakan aktivitas yang mampu mengisi GAP dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada seperti COREMAP, 2) Capacity Building yang dijelaskan pada usulan akuakultur perlu dijelaskan bentuknya, 3) kolaborasi dengan K/L pelaksana lainnya contoh BRIN sudah pernah melakukan riset terhadap tutupan lamun
- Terkait beberapa usulan akan dilihat kembali, mana yang bisa memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan IPTEK khususnya pengembangan kebijakan (*policy*) melalui pengetahuan dan inovasi
- Terkait tema-tema riset strategis perlu dipastikan secara besrsama harus dipastikan agar inline dengan sasaran kita di 20 tahun ke depan contohnya peningkatan daya saing SDM melalui pendidikan dan kesehatan
- Penajaman pada detail kegiatan yang diusulkan bisa melauai pembuatan TOR kegiatan dimana konsepnya dibebaskan pada unit kerja masing-masing, poin khusus pada justifikasi kebutuhan agar inline dengan sasaran 20 tahun ke depan
- Harapannya kegiatan yang dilakukan melalui Hibah KONEKSI dapat memberikan manfaat sampai nantinya bisa menghasilkan keuntungan komersil

#### d. Undangan Peluncuran Dana Nusantara

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2023 di Hotel Kempinski Jakarta. Agenda pertemuan ini adalah peluncuran Dana Nusantara. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Masyarakat adat dan komunitas lokal berperan penting sebagai garda depan pelestarian lingkungan, tetapi dukungan dana untuk mereka minim
- Dana Nusantara dibentuk untuk menghibahkan dana secara langsung ke mereka. Untuk memperoleh dana ini, masyarakat adat dan komunitas lokal dapat mengajukan proposal
- Dana Nusantara dihimpun atas inisiatif Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Konsorsium Pembaruan Agraria
- Dana ini telah diuji coba di 30 lokasi di Indonesia sejak Desember 2022. Beberapa diantaranya adalah Desa Pelayungan (Jambi), Desa Badau (Bangka Belitung), Desa Ibum (Jawa Barat), Desa Plantang (Nusa Tenggara Timur), Desa Kalaodi (Maluku Utara), dan Desa Sikalang (Sumatera Barat)
- Dana ini dapat dimanfaatkan untuk lima hal, antara lain: (i) pemetaan wilayah adat, wilayah kelola rakyat, dan lokasi prioritas reforma agraria; (ii) peningkatan perlindungan dan pendaftaran wilayah adat; (iii) rehabilitasi dan restorasi lahan; (iv) pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan; dan (v) pembentukan pusat pendidikan rakyat untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat



Gambar 28. Peluncuran Dana Nusantara

e. **Diskusi dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAC) dan PT. Freeport Indonesia**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 di Ruang Rapat ICCTF.

Agenda pertemuan ini adalah sharing knowledge bersama dengan YPMAC dan PT. Freeport Indonesia. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- YPMAC akan belajar mengelola dana swakelola dari ICCTF
- Mekanisme penyaluran hibah di ICCTF sesuai kesepakatan dengan donor, yang dituangkan di dalam Nota Perjanjian Kerjasama
- Perbedaan Hibah Langsung dan Hibah Terencana, utamanya yaitu pada perencanaannya pada DIPA, pencatatan di awal dan akhir tahun
- Proses pencairan ke mitra pelaksana untuk hibah langsung berdasarkan surat instruksi yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris MWA ICCTF yang dikuasakan ke Direktur Eksekutif
- Pengajuan pencairan oleh donor sudah ditetapkan di *Grant Agreement* dan masing-masing donor berbeda perlakuannya, dapat dilakukan di awal project, per termin, atau per 6 bulan sekali
- Pemilihan Bank dilakukan *by bidding* oleh *Steering Committee (SC)* dan kerja sama dengan Bank terkait biaya-biaya yang dikenakan oleh Satker ICCTF
- Rencana ke depan terkait Blue Carbon dan Blue Finance sedang dalam pembahasan
- Mitigasi *mangrove* di Kabupaten Mimika akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat local terkait penambahan dana oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAC) – PT. Freeport Indonesia



Gambar 29. Knowledge Sharing dengan YPMAC dan PT. Freeport Indonesia

#### f. Diskusi Pendanaan Bencana dengan IRID

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 secara online. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan pendanaan berkelanjutan untuk kebencanaan. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Sumber Dana BNPB adalah APBN, Hibah Internasional dan PFB
- Dana Tanggap Darurat digunakan untuk Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri (dengan ijin Presiden RI) dan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Dalam Negeri
- Penggunaan tersebut berdasarkan Penetapan keadaan darurat oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Presiden, Pertimbangan resiko bencana berdampak luas oleh BNPB, dan Penetapan status keadaan tertentu
- Prosedur penggunaan DSP bermula dari Verifikasi, Penyaluran, Penggunaan, pengembalian, dan pertanggung Jawaban
- Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dan masih terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga terkait wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara
- Data dan kajian sebagian besar terkait dengan kejadian bencana hidrometeorologis (rapid onset)
- Data dan kajian yang terbatas merupakan kendala untuk memahami dampak perubahan iklim yang berlangsung perlahan-jangka panjang, khususnya pada sumberdaya alam hayati
- Adanya celah kelembagaan yang melakukan pemantauan pada sebagian parameter iklim dan dampak perubahan iklim, serta dalam upaya penanganannya – khususnya pada karakteristik bencana yang bersifat slow onset
- Strategi dan instrumen keuangan yang sedang dikembangkan di Indonesia dan tingkat global sebagian besar/hampir seluruhnya sesuai untuk risiko yang bersifat rapid onset, celah nyata adalah untuk skema pendanaan untuk kejadian slow onset



Gambar 30. Diskusi pendanaan berkelanjutan untuk kebencanaan

#### **g. Rapat Pengadaan TOR Sistem Arafura**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2023 di Ruang Rapat ICCTF. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan TOR Sistem Arafura. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

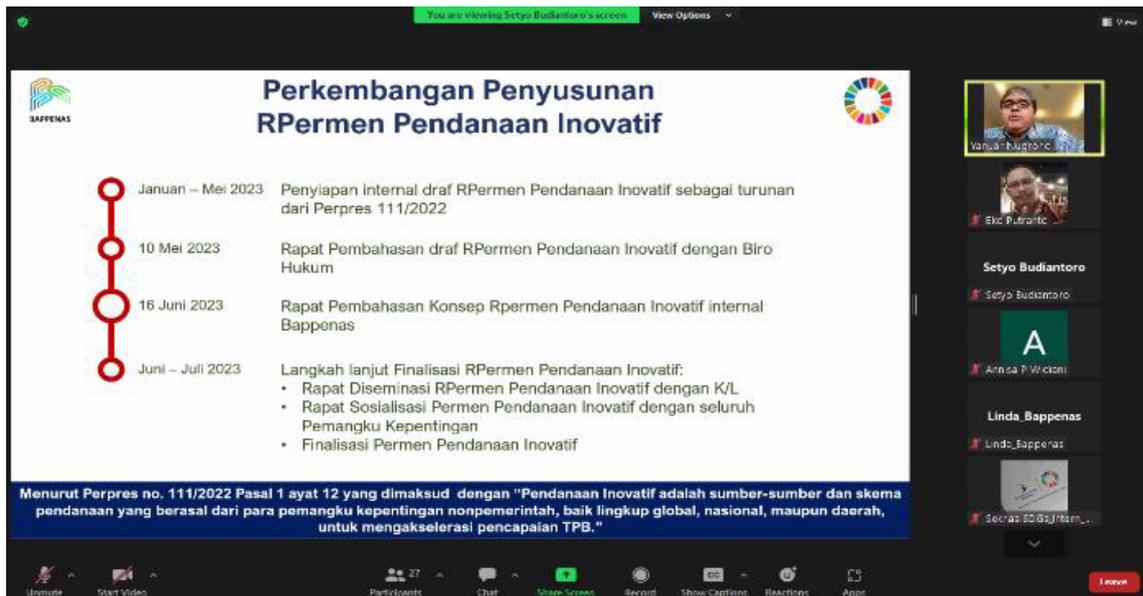
- Pekerjaan sudah dilakukan. Aplikasi yang sudah ada dan demo yang ditunjukkan itu adalah aplikasi yang ada di komputer/dekstop. Aplikasi tersebut sepanjang cloud aktif maka aplikasi bisa digunakan
- Ada permintaan dari user untuk penggunaan aplikasi mobile sehingga ditambahkan untuk android, namun IOS tidak termasuk untuk menekan biaya
- Permasalahan aplikasi sama dengan aplikasi observer. Jika sinyal hilang tidak bisa langsung update namun ketika sudah ada sinyal maka langsung update data yang telah dientri tersebut
- Pengadaan Menggunakan Jasa Konsultan dan karena diatas 100 juta maka akan melalui lelang ULP. Pengajuan akan dilakukan secepatnya
- TOR desktop dan aplikasi mobile akan dijadikan satu

#### **h. Rapat Pembahasan Konsep Rancangan Peraturan Menteri PPN terkait Pendanaan Inovatif**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 16 juni 2023. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan konsep RPermen Pendanaan inovatif. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan Perpres No. 111/2022 Pasal 1 ayat 12 yang dimaksud Pendanaan Inovatif adalah sumber-sumber dan skema pendanaan yang berasal dari para pemangku kepentingan nonpemerintah, baik lingkup global, nasional, maupun daerah, untuk mengakselerasi pencapaian TPB
- Kelembagaan pendanaan inovatif ini memiliki tugas antara lain:
  - a. Merumuskan strategi dan mengkoordinasikan pengembangan pendanaan inovatif secara integratif untuk percepatan pencapaian TPB
  - b. Menetapkan pedoman dan standard pendanaan inovatif yang komprehensif sehingga kepastian program/proyek yang didanai memiliki dampak signifikan dan berkelanjutan untuk pencapaian TPB
  - c. Monitoring pelaksanaan program/proyek agar tetap sesuai dengan pedoman dan standard yang telah ditetapkan
- Pelaporan pelaksanaan kelembagaan pendanaan inovatif ini ditujukan kepada Menteri PPN minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan
- Pengambilan keputusan dalam kelembagaan pendanaan inovatif dilakukan secara musyawarah untuk mufakat

- Kriteria minimal Program atau proyek pendanaan inovatif yang mendapatkan prioritas insentif yaitu:
  - a. Termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan tingkat nasional atau daerah;
  - b. Diperuntukkan untuk kelompok masyarakat rentan;
  - c. Diperuntukkan untuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Terluar);
  - d. Ditujukan pada salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memerlukan perhatian khusus



Gambar 31. Paparan Narasumber mengenai RPermen Pendanaan Inovatif

#### i. Undangan SC Meeting Oceans MDFTF

ICCTF menghadiri pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 ini secara online melalui Zoom. Agenda kegiatan ini adalah Steering Committee Meeting project Oceans MDFTF. Hasil dan tindak lanjut dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Oceans MDTF World Bank bertujuan untuk memperdalam pengetahuan, meningkatkan kesadaran dan memperkuat koordinasi untuk menginformasikan strategi dan rencana untuk mengelola lautan Indonesia secara berkelanjutan, mengurangi sampah laut dan memperkuat sumber daya pesisir. Project ini dibiayai oleh Norwegia (US\$ 2,54 M) dan Denmark (US\$ 1,93 M)
- Arahan Pak Menko akan ada program untuk kontribusi langsung mengatasi kebocoran sampah dari daratan. Saat ini sedang ada pekerjaan keras dalam pengelolaan sampah di kawasan laut, bekerja sama dengan Pemda dan K/L lain serta mitra pembangunan untuk meningkatkan kapasitas stakeholders
- Pengelolaan sampah ada di bawah kewenangan Pemda. Umumnya kapasitas pemda khususnya teknologi, tata kelola, dan pendanaan masih kurang. Perlu peningkatan alokasi anggaran untuk pemda terkait pengelolaan sampah, menjadi layanan dasar dan wajib

- Sub Component 1.4: Preparation of Mangroves Blue Carbon Offsets Readiness akan mendukung pengembangan program karbon biru untuk membuat pengurangan emisi yang dihasilkan dalam Operasi memenuhi syarat untuk pembayaran melalui: 1) analisis dan riset; 2) pengukuran karbon, pelaporan dan registrasi, serta pembangunan sistem; 3) regulatory framework carbon; 4) benefit-sharing plan; dan 5) capacity building. Asesmen awal akan dilakukan di Kalimantan Utara



Gambar 32. Jalannya diskusi pada SC Meeting Oceans MDTF

#### j. Ground Check terkait Penyusunan Rencana Zonasi Calon Kawasan Konservasi Kota Batam

Kunjungan Lapang ini dilaksanakan pada tanggal 21-24 Juni 2023 di Batam. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengonfirmasi ulang kondisi ekologi dan sosial-ekonomi calon lokasi kawasan konservasi kota Batam. Hasil dan tindak lanjut dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:



Gambar 33. Foto bersama tim survei di lapangan

- Kondisi terumbu karang pada lokasi survey berada pada kondisi sedang sampai baik, dan didominasi oleh kondisi sedang.
- Dari 8 stasiun yang diusulkan hanya 7 stasiun yang berhasil diamati (stasiun 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15). Stasiun 16 tidak bisa diamati karena kondisi arus perairan yang sangat kuat sehingga tidak memungkinkan untuk mendekat di pulau
- Dari hasil pengamatan, dapat dikatakan kondisi tutupan lamun di stasiun pengamatan termasuk dalam kategori jarang.

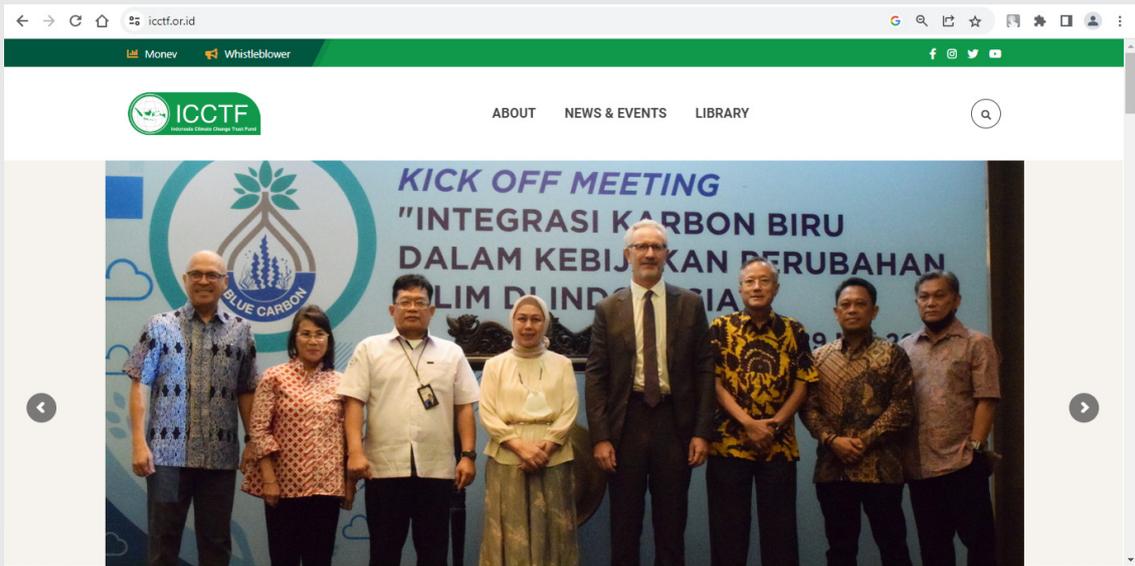
Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas.

ICCTF saat ini lebih banyak melakukan strategi pendekatan komunikasi secara digital karena dinilai lebih interaktif dan *realtime* melalui pengelolaan website (<https://www.icctf.or.id/>) dan beberapa akun media sosial yang terdiri dari: Instagram (@icctfofficial); Twitter (@ICCTF\_ID); Facebook (IndonesiaClimateChangeTrustFund) dan Youtube (ICCTF Official). ICCTF senantiasa berupaya untuk selalu mengoptimalkan kanal informasi yang tersedia tersebut dengan mempublikasikan informasi dan foto-foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para mitra pelaksana.

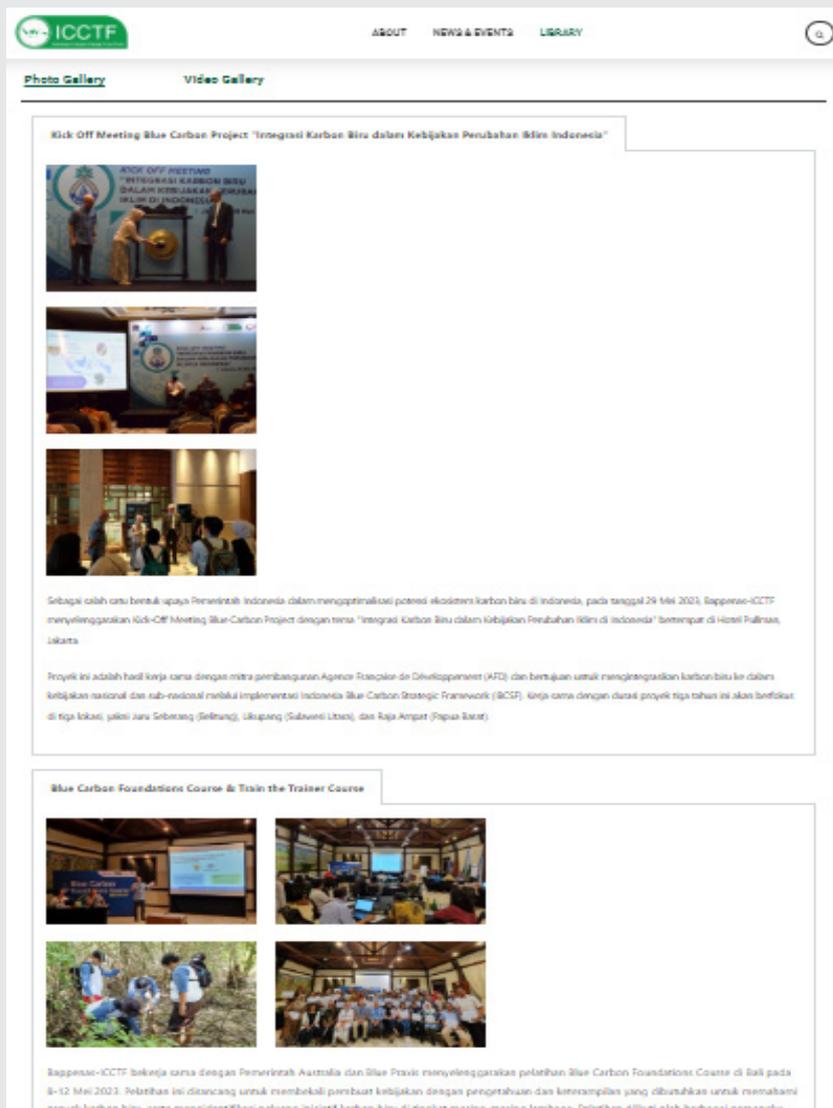
## 1. Portofolio Website dan Media Sosial ICCTF pada Triwulan Kedua Tahun 2023



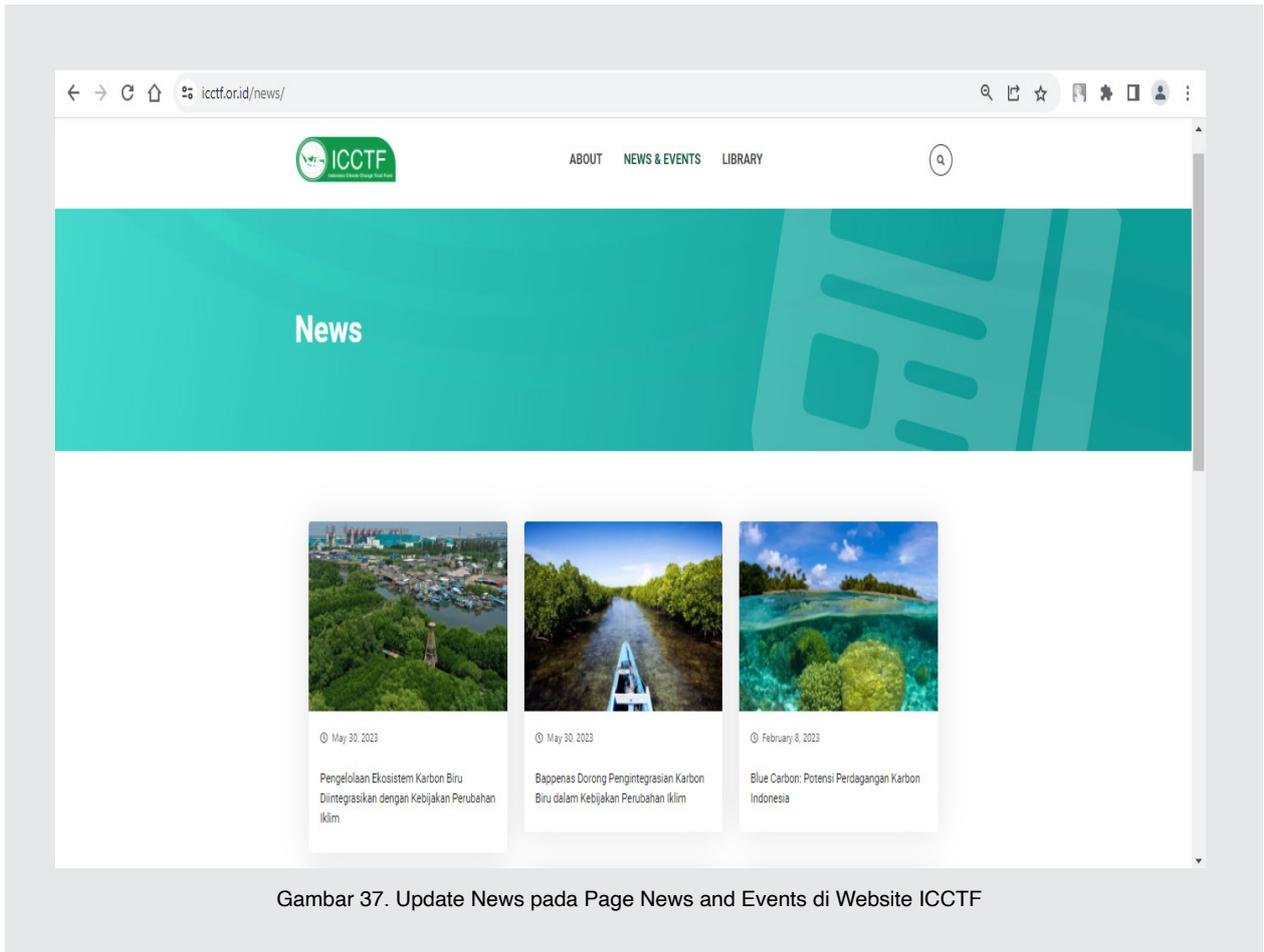
Gambar 34. Statistik Pengunjung Website ICCTF



Gambar 35. Update Slider pada Homepage di Website ICCTF



Gambar 36.  
Update Multimedia  
pada Page Gallery  
di Website ICCTF



Gambar 37. Update News pada Page News and Events di Website ICCTF



Gambar 38. Infografis Perkembangan Akun Media Sosial ICCTF



Gambar 39. Kompilasi Konten Akun Media Sosial ICCTF

## 2. Pemantauan Hasil Publikasi Media Kegiatan Kick-Off Meeting Blue Carbon Project: Integrasi Karbon Biru dalam Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia

Tabel 1. Daftar Publikasi Media pada Kegiatan Kick-Off Meeting Blue Carbon Project

No.	Tanggal	Media	Judul	Link
1	29/05/2023	KOMPAS	Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Diintegrasikan dengan Kebijakan Perubahan Iklim	<a href="https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/29/pengelolaan-ekosistem-karbon-biru-diintegrasikan-dengan-kebijakan-perubahan-iklim">https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/29/pengelolaan-ekosistem-karbon-biru-diintegrasikan-dengan-kebijakan-perubahan-iklim</a>
2	29/05/2023	Media Indonesia	Bappenas Dorong Pengintegrasian Karbon Biru dalam Kebijakan Perubahan Iklim	<a href="https://mediaindonesia.com/humaniora/584981/bappenas-dorong-pengintegrasian-karbon-biru-dalam-kebijakan-perubahan-iklim">https://mediaindonesia.com/humaniora/584981/bappenas-dorong-pengintegrasian-karbon-biru-dalam-kebijakan-perubahan-iklim</a>
3	29/05/2023	ANTARA News	Indonesia Optimalkan Potensi Karbon Biru Guna Mitigasi Perubahan Iklim	<a href="https://www.antarane.ws.com/berita/3561099/indonesia-optimalkan-potensi-karbon-biru-guna-mitigasi-perubahan-iklim">https://www.antarane.ws.com/berita/3561099/indonesia-optimalkan-potensi-karbon-biru-guna-mitigasi-perubahan-iklim</a>
4	29/05/2023	ANTARA News	Proyek Karbon Biru Berfokus di Wilayah Timur Indonesia	<a href="https://www.antarane.ws.com/berita/3561402/proyek-karbon-biru-berfokus-di-wilayah-timur-indonesia">https://www.antarane.ws.com/berita/3561402/proyek-karbon-biru-berfokus-di-wilayah-timur-indonesia</a>
5	29/05/2023	Valid News	Proyek Karbon Biru Fokus Di Timur Indonesia	<a href="https://www.validnews.id/nasional/proyek-karbon-biru-fokus-di-timur-indonesia">https://www.validnews.id/nasional/proyek-karbon-biru-fokus-di-timur-indonesia</a>
6	30/05/2023	Koran Jakarta	RI Optimalkan Potensi Karbon Biru untuk Mitigasi Perubahan Iklim	<a href="https://koran-jakarta.com/ri-optimalkan-potensi-karbon-biru-untuk-mitigasi-perubahan-iklim">https://koran-jakarta.com/ri-optimalkan-potensi-karbon-biru-untuk-mitigasi-perubahan-iklim</a>



**3**

## **AUDIT, KEUANGAN** Dan OPERASIONAL

### A. Audit BPK Tahun 2023

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara. Pada tahun 2023 ini BPK sedang mengaudit Laporan Keuangan Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2022 dan opini masih belum difinalkan. Begitu pula untuk kegiatan Hibah Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) Tahun Anggaran 2022 saat ini juga masih dalam audit oleh BPK Audit Khusus tahun 2023 dan opini belum difinalkan

### B. Informasi Keuangan Periode Januari - Maret 2023

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga, prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada tahun 2023 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 12M dan dana Hibah Luar Negeri (Hibah Terencana) sebesar 14,4M sehingga total dana yang dikelola ICCTF Tahun Anggaran 2023 adalah 26,4M. Capaian pada kuartal 2 tahun 2023 adalah sebesar 7,81M yaitu 29,61% dari total dana yang dikelola (**Tabel 2**).

Tabel 2. Rincian alokasi dana pada Satker ICCTF Periode April - Juni Tahun 2023

Sumber Dana	Anggaran	Penyerapan	Sisa Anggaran	
APBN - ICCTF	12.000.000.000	3.493.271.256	29%	8.506.728.744
Hibah – Asian Development Bank (Reksus)	14.400.000.000	4.323.793.730	30%	10.076.206.270
<b>TOTAL</b>	<b>26.400.000.000</b>	<b>7.817.064.986</b>	<b>30%</b>	<b>18.582.935.014</b>

### C. Operasional / Kesekretariatan

Pada triwulan kedua tahun 2023 ini, jumlah tenaga profesional yang mendukung kegiatan ICCTF berjumlah 22 Orang. Penyebaran gender terdiri dari 14 jenis kelamin laki-laki dan 8 jenis kelamin perempuan sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Pendanaan
1	Gabriel A. Wagey	Executive Director	Rupiah Murni (APBN)
2	Mega Gusti Rama	Finance and Operation Manager	Rupiah Murni (APBN)
3	Februanty Suyatiningsih	Program Manager	Rupiah Murni (APBN)
4	Anggri Heravanthi	Accounting Specialist	Rupiah Murni (APBN)
5	Siwi Handinah	General Adm dan HR Coordinator	Rupiah Murni (APBN)
6	Muhammad Wildan Kautsar	Knowledge Management Officer	Rupiah Murni (APBN)
7	Joshua Arianto M	Program Officer	Rupiah Murni (APBN)
8	Eko Wahyudi	Finance and Administration Officer COREMAP-CTI WB	Rupiah Murni (APBN)
9	Agus Salim	Logistic and General Support	Rupiah Murni (APBN)
10	Sugihartono	Office Assistant	Rupiah Murni (APBN)
11	Muhamad Nuryanto	Database Assistant	Rupiah Murni (APBN)
12	Nur Jali	Procurement Officer	Rupiah Murni (APBN)
13	Andrian Firmansyah	Tenaga Operasional Perkantoran	Rupiah Murni (APBN)
14	Budiyanto	Pengemudi	Rupiah Murni (APBN)
15	Steven R. Limbong	PME Officer	Rupiah Murni (APBN)
16	Alya Prima Syanti	Financial Management Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
17	Leonas Chatim	Project Team Leader COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
18	Nia Kania	Administration Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
19	Nanda Sachra Y	Monev Specialist COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
20	Novita Fitrianingrum	Program Officer COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
21	Lalu Alid Riadi	Site Coordinator Gili Balu	Hibah LN ADB
22	Derick Prawira	Creative Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB

Kegiatan-kegiatan Sekretariat ICCTF yang dilaksanakan sepanjang triwulan 2 tahun 2023, antara lain:

**a. Undangan Rapat Lesson Learned PKS dan Kontrak Swakelola**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023 di Tangerang. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan lesson learned dari PKS dan Kontrak Swakelola. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan swakelola yang dilaksanakan ICCTF periode 2020-2022 adalah Hibah Terencana World Bank dan Asian Development Bank
- Tujuan swakelola ICCTF adalah:
  1. Untuk Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;
  2. Untuk Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat
  3. Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola
  4. Untuk memaksimalkan penggunaan barang/jasa yang dihasilkan oleh Kelompok Masyarakat, contoh: tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk hasil masyarakat
  5. Untuk meningkatkan penggunaan barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat seperti pembangunan sekat kanal, semur resapan, rehabilitasi terumbu karang
- Hal-hal yang perlu disepakati dalam swakelola:
  1. Kerangka Acuan Kerja meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, lingkup dan lokasi kegiatan, pendekatan dan metodologi, target dan indicator, jangka waktu pelaksanaan, keluaran, dan pelaporan.
  2. Proses perencanaan yang menjabarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari ketiga pihak, yakni ICCTF Bappenas, Mitra Pelaksana dan Penerima Manfaat (Beneficiaries).
  3. Jadwal pelaksanaan kegiatan mencakup rencana pelaksanaan komponen kegiatan yang akan dilakukan pada bulan dan tahun bersangkutan.
  4. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). PIU ICCTF Bappenas memastikan tingkat kewajaran sampai ke detail pengeluaran untuk memastikan penggunaan sumber daya yang tepat dan akuntabel terhadap pencapaian tujuan proyek
- Ketentuan pembiayaan swakelola ICCTF:
  1. Biaya Operasional Kantor seperti Sewa Kantor, Listrik, Internet dan Biaya rutin Perkantoran lainnya di kantor pusat tidak diperbolehkan, kecuali membuka site office khusus untuk proyek ICCTF di lapangan.
  2. Biaya Honorarium Gaji Bulanan untuk Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan kecuali cuti di luar tanggungan negara. Untuk PNS bisa diberikan honorarium narasumber/moderator per kegiatan rapat/workshop/seminar tidak termasuk pelatihan.

3. Pengeluaran yang berhubungan dengan hiburan, Semua minuman yang berbau alcohol, Tembakau atau penggantinya dan mesin pemrosesan tembakau, Radioaktif dan material sejenisnya, Mutiara, benda berharga dan batu – batu semi mewah, Reaktor Nuklir dan bagian - bagian yang relevan, Perhiasan dan Emas, Barang – barang yang ditujukan untuk militer atau untuk kebutuhan yang mewah, Barang – barang yang membahayakan lingkungan tidak diperkenankan.
4. Biaya operasional 10% atau maximum 30% dari keseluruhan nilai proyek (tergantung ketentuan dari donor)
5. Pembelian asset untuk kebutuhan operasional tidak diperbolehkan. Jika membutuhkan prasarana pendukung, diperbolehkan sewa selama masa proyek berjalan.
6. Semua biaya adalah at-cost dan melampirkan bukti-bukti transaksi

**b. Undangan Rapat Pemantauan Kegiatan PHLN Kedeputian Kemaritimatan dan Sumber Daya Alam Tahun 2023**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 di Kantor Bappenas. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan progress pelaksanaan anggaran dan capaian output kegiatan PHLN lingkup Kedeputian. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan COREMAP harus memastikan dana yang sisa bisa dimanfaatkan secara optimal sampai penutupan proyek
- Administrasi proyek laporan keuangan hibah luar negeri dipenuhi untuk ke Bappenas dan memastikan output proyek tercapai sesuai dengan proyek yang ditetapkan
- Memastikan proyek sesuai dengan tugas dan fungsi Bappenas
- Pengesahan blue carbon AFD harus segera dilaksanakan, beserta dengan rencana realisasi anggaran untuk dapat segera dilakukan.

No.	Nama Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Bentuk PHLN	Status Pengesahan	
				Tahun 2023	Tahun pengesahan sebelumnya
6	USAID SINAR	Direktorat Kelautan dan Perikanan	Jasa	Belum ada pengesahan	Belum ada pengesahan
7	Blue Carbon Ecosystems Management Into Indonesia Biodiversity and Climate Policies Project	Direktorat Kelautan dan Perikanan	Jasa	Belum ada pengesahan	Belum ada pengesahan
8	USAID – SINAR	Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pembangunan	Jasa	Belum ada pengesahan	Belum ada pengesahan
9	The Sustainable Ecosystem Management Program (STEM)	Direktorat Kehutanan Konservasi Sumber Daya Air	Barang, Jasa	Belum ada pengesahan	8 Desember 2022 atas periode Juni-September 2022
10	Strengthening Capacities for Policy Planning for the Implementation of the 2030 Agenda in Indonesia and in The Global South (SDGsSSTC)	Sekretariat SDGs	Jasa	Belum ada pengesahan	22 September 2022 atas periode Juni 2021 - Mei 2022

Gambar 40. Diskusi pembahasan kegiatan PHLN di Kedeputian KSDA Tahun 2023

c. **Undangan FGD Pembahasan Kebijakan Internal Pengelolaan Satu Akun Angka Standar Buku Internasional Kementerian PPN/Bappenas**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal xx Juni 2023 di Hotekl Westin Jakarta. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan kebijakan internal pengelolaan satu akun angka standar buku internasional. Hasil dari pertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Telah diidentifikasi 31 akun ISBN di Kementerian PPN/Bappenas
- Akan ditetapkan satu akun saja di bawah Biro Humas sebagai pemilik akun. Seluruh akun yang lama nanti akan dinonaktifkan.
- Internal Bappenas selanjutnya perlu menentukan tim pengelola
- Menyusun peraturan/SOP dalam pengajuan nomor ISBN
- Mengirimkan surat resmi ke Perpustakaan Nasional terkait penetapan akun
- Melakukan sosialisasi ke semua unit kerja
- Pembahasan pedoman mekanisme akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya



Gambar 41. Diskusi pembahasan kebijakan satu akun



# LAPORAN 2 TRIWULAN 2023

